

Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Disabilitas

¹Yola Afalia, ²Sabirin, ³Hijrah Saputra

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

(email: 210405020@student.ar-raniry.ac.id, sabirin@ar-raniry.ac.id, hijrah.saputra@ar-raniry.ac.id).

Abstract

This study examines the involvement of the Aceh Disaster Management Agency (BPBA) in disaster preparedness for persons with disabilities, who are often overlooked in disaster management programs. The objective of this research is to analyze BPBA's efforts in preparing and protecting individuals with disabilities before disasters occur. The methodology employed is a qualitative approach, utilizing data collection through interviews and observations with informants including the Head of the BPBA Preparedness Division, Chairman of the Disaster Risk Reduction Forum (PRB), PRB members, Support Teachers, and Persons with Disabilities. The findings indicate that BPBA has undertaken various initiatives to enhance disaster preparedness for persons with disabilities through partnerships. However, this study also recommends that BPBA establish a dedicated disability services unit to address the needs of individuals with disabilities.

Keywords: Involvement, Aceh Disaster Management Agency (BPBA), Preparedness, Disaster Management, Disabilities.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas, yang seringkali terabaikan dalam program penanggulangan bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya BPBA dalam mempersiapkan dan melindungi individu penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dengan narasumber antara lain Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBA, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB), anggota PRB, Guru Pendukung, dan Penyandang Disabilitas. Temuan menunjukkan bahwa BPBA telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas melalui kemitraan. Namun penelitian ini juga merekomendasikan agar BPBA membentuk unit layanan disabilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Keterlibatan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Kesiapsiagaan, Penanggulangan Bencana, Disabilitas,

Pendahuluan

Kesiapsiagaan bencana adalah komponen kunci dalam manajemen bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bencana. Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan vulkanisme. Kondisi geofisik yang tidak menguntungkan ini menjadikan setiap daerah di Indonesia, termasuk Aceh, sangat rentan terhadap ancaman bencana. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan dalam situasi bencana.

Fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan unik yang membuat mereka lebih rentan saat bencana terjadi. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan dan program mitigasi sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga mereka sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan implementasi program penanggulangan bencana. Akibatnya, pada saat terjadi bencana, penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi dan dukungan yang memadai, berpotensi meningkatkan risiko mereka terhadap dampak bencana yang lebih parah.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) merupakan lembaga yang diamanahkan untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Provinsi Aceh. Dalam upayanya, BPBA seharusnya juga memperhatikan inklusivitas, dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan eksekusi kebijakan terkait bencana. Namun, terdapat anggapan bahwa peran BPBA dalam kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas masih kurang optimal dan sering kali tidak terlihat.

Kajian ini penting untuk dilakukan agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana BPBA berkontribusi dalam kesiapsiagaan bencana untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh BPBA, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses kesiapsiagaan bencana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan rekomendasi praktis yang dapat

memperbaiki pendekatan BPBA dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekurangan literatur yang ada mengenai manajemen bencana yang inklusif di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas, serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adil dan merata. Penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang penanggulangan bencana, sekaligus mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kehadiran penyandang disabilitas dalam setiap aspek kebijakan terkait bencana.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh Rizkiah et al. (2023) yang menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesiapsiagaan kelompok disabilitas dalam menghadapi gempa bumi. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kesadaran dan edukasi, masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang siap dalam menghadapi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam situasi darurat.

Teori keterlibatan sosial dari Yoesoep Edhie Rachmad (2022) menjadi dasar dalam penelitian ini, yang mencakup tiga indikator utama: partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pengembangan peran sosial yang bermakna, serta komitmen untuk tetap berada dalam kelompok dan berinteraksi dengan anggota lain. Ketiga aspek ini menjadi elemen penting dalam menilai sejauh mana BPBA telah berhasil melibatkan penyandang disabilitas dalam kesiapsiagaan bencana.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk menggambarkan dan perkataan berdasarkan situasi atau keadaan yang terjadi sesuai dengan kejadian dilapangan. Yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah peneliti tidak menggunakan hasil penelitian dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk gambaran. Data yang dikumpulkan mencakup transkrip wawancara, catatan data di lapangan, dan foto-foto, serta catatan lainnya.

Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian

yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data, informasi, dan fakta empiris di lapangan. Mengingat penelitian ini terkait dengan bidang Islam dan UU No. 8 Tahun 2016, maka peneliti akan memperdalam dan mencari informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBA telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas melalui sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan kelompok rentan. Salah satu bentuk keterlibatan BPBA adalah dengan mendukung Forum PRB dalam menyelenggarakan program edukasi kebencanaan yang inklusif, termasuk penerapan bahasa isyarat dalam sosialisasi dan pelatihan evakuasi bagi penyandang disabilitas.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam implementasi kesiapsiagaan bencana yang inklusif. Salah satunya adalah keterbatasan unit layanan khusus bagi penyandang disabilitas di BPBA. Saat ini, BPBA belum memiliki sistem atau protokol khusus yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi darurat. Hal ini menyebabkan aksesibilitas terhadap jalur evakuasi dan tempat pengungsian masih menjadi masalah utama yang belum teratasi sepenuhnya.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani penyandang disabilitas menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana yang inklusif. Banyak petugas BPBA yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang cara mengevakuasi dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang lebih spesifik dan menyeluruh bagi para petugas BPBA serta relawan kebencanaan.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya koordinasi antara BPBA dengan organisasi yang berfokus pada penyandang disabilitas. Meski ada beberapa program kerja sama, belum terdapat mekanisme tetap yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses perencanaan kebijakan kebencanaan. Padahal, partisipasi aktif penyandang disabilitas sangat diperlukan agar program kebencanaan yang diterapkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan BPBA masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencakup metode komunikasi yang ramah disabilitas. Misalnya, belum semua materi pelatihan tersedia dalam bentuk braille untuk penyandang tuna netra atau

menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang tuna rungu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyampaian informasi kebencanaan.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa banyak penyandang disabilitas merasa kurang dilibatkan dalam diskusi-diskusi kebencanaan. Padahal, mereka memiliki pengalaman dan perspektif unik yang dapat membantu BPBA dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, BPBA perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan komunitas disabilitas dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana.

Selain aspek kebijakan dan edukasi, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengadaan infrastruktur yang lebih inklusif. Saat ini, masih banyak tempat pengungsian yang tidak memiliki fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai, toilet khusus, atau tempat tidur yang dapat diakses dengan mudah. BPBA perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa tempat-tempat pengungsian dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas.

Lebih lanjut, BPBA juga disarankan untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang dapat menjangkau penyandang disabilitas. Misalnya, melalui penggunaan pesan suara bagi tuna netra atau pemberitahuan visual bagi tuna rungu. Teknologi berbasis aplikasi juga dapat dikembangkan untuk memberikan informasi kebencanaan secara real-time kepada penyandang disabilitas.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas dapat lebih baik, sehingga mereka dapat menghadapi bencana dengan lebih siap dan aman.

Kesimpulan

Kesiapsiagaan bencana bagi penyandang disabilitas di Aceh masih menghadapi banyak tantangan. BPBA telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam program kebencanaan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pembentukan unit layanan disabilitas dalam struktur BPBA, peningkatan infrastruktur aksesibilitas, dan peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan kebencanaan.

Penelitian ini merekomendasikan agar BPBA segera membentuk unit layanan khusus bagi penyandang disabilitas, memperluas pelatihan inklusif bagi tenaga kebencanaan, serta

meningkatkan kerja sama dengan organisasi disabilitas untuk menciptakan sistem kebencanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan

Referensi

BNPB, *Sejarah Berdirinya BNPB*, <https://www.bnpb.go.id/sejarah-bnpb>

BPBA, *Sejarah Badan Penanggulangan Bencana* <https://bpba.acehprov.go.id/halaman/sejarah-badan-penanggulangan-bencana-aceh>

BPBD BOGOR, *Bencana dan Manajemen Aceh, Bencana*, <https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/>

DINAS SOSIAL, *Qanun Disabilitas Dukung Pemenuhan Hak-Hak Difabel*, <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslem-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel>

Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo, 2013.

Nurjannah, Dkk, *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang *Penanganan, Perlindungan, dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana*.

Prajalani, Y. N. H, *Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo*. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2) 2017, 87-95.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana

Ridwan, Z. *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2) 2013.

Rizkiah, I, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Kelompok Disabilitas Dalam Menghadapi Gempa Bumi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2023.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.